



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Komentar (Hal. 11)

Senin, 4 Januari 2021

### DID Tak Digeser Untuk Covid, Berpeluang Menjadi Temuan BPK

**Amurang, KOMENTAR**

Setelah dikeluarkannya status bencana nasional alam yang disebabkan Pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satunya lewat Kementerian Keuangan untuk melakukan pergeseran anggaran sampai di daerah yang digunakan untuk penanganan pandemi termasuk dampak ekonominya. Salah satunya melalui Peraturan Menteri keuangan (PMK) no 7 tahun 2020 tentang pedoman perubahan kegiatan dalam rangka penanggulangan COVID-19.

Pada rangkaian peraturan yang dikeluarkan pemerintah yakni melakukan pergeseran. Untuk program yang dapat ditunda seperti pembangunan fisik, dialihkan untuk penanganan covid. Seperti anggaran Dana Insentif Daerah (DID) yang diperoleh oleh Pemkab Minsel. Namun dari informasi yang diperoleh, meski telah ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK), tentang pengalihan anggaran, Pemkab Minsel pada 2020 kemarin tetap memaksakan menggunakan anggaran tersebut untuk proyek fisik. Diketahui anggaran sebesar Rp 10 miliar digunakan untuk pembangunan jalan di Kecamatan Tatapaan.

Kenekatan Pemkab Minsel dengan tetap melaksanakan proyek pengerjaan fisik padahal seharusnya dialihkan bagi penanganan Covid dan dampaknya, tidak menutup kemungkinan menjadi temuan BPK. Bukan hanya DID, Dana Alokasi Umum

(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga diketahui masih ada yang digunakan untuk proyek fisik.

"Pelanggaran peraturan ini dapat dijadikan sebagai jalan masuk dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran lain. BPK, APH (Aparat Penegak Hukum, red) silakan masuk dan lakukan pemeriksaan. Bisa saja ngototnya Pemkab Minsel menggunakan anggaran untuk proyek fisik karena ada 'perjanjian' dengan pihak ketiga. Nah bila ini benar terjadi, maka bukan tidak mungkin telah terjadi praktek korupsi yang merugikan keuangan negara," ujar tokoh masyarakat Minsel Wilem Pasla.

Selain tidak melaksanakan PMK dan aturan lainnya pada penggunaan DID, Pasla juga menyinggung pemanfaatan dana Covid-19 yang bersumber dari pergeseran. Dia menyinggung pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan. Begitu pula dengan proyek pengadaan masker di BPBD.

"Informasi yang kami terima pengadaan bantuan bagi warga terdampak serta pelaksanaan proyek non fisik penanggulangan Covid juga bermasalah. Nah kami minta ini diperiksa, karena memang tidak menutup kemungkinan diselewengkan. Kan infonya di Kabupaten Minut sudah menjadi temuan. Maka dari itu kami harapkan siapapun yang berwenang diharapkan segera turun tangan," bebernya.<sup>(vtr)</sup>